

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Rustiadi dkk, 2011). Menurut Todaro (2000) ada tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki, yaitu: (1) *live sustainance* atau terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia (2) *self esteem*, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) *freedom*, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.

Kebijakan pembangunan salah satunya dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang tentunya dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Pembangunan ekonomi adalah proses yang menciptakan pendapatan riil per kapita sebuah negara meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat bahwa sejumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan mutlak tidak naik dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Menurut Meier (2009), pembangunan ekonomi masyarakat pada hakekatnya merupakan usaha yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada hakekatnya pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Ketiganya mengisi fungsi dan peran masing-masing dalam mengisi pembangunan (Saragih, 2009). Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-

masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Dermoredjo, 2003).

Salah satu sektor penting dalam pembangunan adalah pembangunan sektor peternakan yang bertujuan meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak, meningkatkan kualitas komoditas ternak, meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor, meningkatkan status kesehatan hewan, mengembangkan usaha peternakan yang terintegrasi dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2010).

Namun saat ini pembangunan sektor peternakan masih belum mampu secara mandiri menjalankan peran pentingnya. Khusus peternakan sapi potong, sebagai penyuplai kebutuhan daging nasional terbesar kedua setelah ayam ras pedaging, saat ini masih melakukan impor sebesar 30% dari kebutuhan nasional (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012).

Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang luas dan semenjak dahulu dikenal dengan negara agraris. Ditambah lagi potensi tenaga kerjanya juga banyak yang dapat memurahkan biaya produksi. Satu hal lagi, peluang pasar untuk usaha peternakan ini akan tetap terbuka seiring dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Dengan melihat betapa penting dan potensialnya peranan pembangunan subsektor peternakan dalam kerangka pembangunan nasional, sudah semestinya subsektor ini menjadi perhatian lebih oleh pemerintah, baik pusat maupun

daerah. Khusus di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, pembangunan peternakan dijadikan salah satu elemen penting dalam melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini tergambar jelas dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, yaitu : *"Terwujudnya Agribisnis Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat yang Sehat, Mandiri dan Sejahtera"*.

Pembangunan bidang peternakan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani ternak dan keuntungan sebesar-besarnya, baik berupa hasil pokok/utama (daging, telur dan susu) atau pangan sumber protein hewani asal ternak dan tenaga ternak untuk membajak sawah atau alat angkut transportasi maupun hasil ikutan (*by product*). Misalnya pupuk kandang untuk menunjang pertanian, kulit untuk bahan baku industri sepatu, tas, alat musik dan wayang tanduk/tulang dipergunakan untuk pembuatan tangkai kipas, kancing baju, tangkai pakan ternak, darah sebagai bahan pakan ternak. Seperti yang diutarakan oleh Simatupang dan Dermoredjo (2003) sebelumnya, bahwa salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin, maka pembangunan subsektor peternakan ini pun diarahkan untuk itu.

Sebagai pelaksana bidang peternakan di Kota Payakumbuh, pada Dinas Pertanian terdapat beberapa program pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu Program Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Program Satu Petani Satu Sapi (SPSS). Program SMD merupakan pemberdayaan kelompok peternak melalui pendampingan kelompok yang diperkuat dengan penyaluran dana penguatan modal usaha. Program SMD adalah program nasional dari Kementerian Pertanian yang dimulai pertama kali di Indonesia semenjak tahun

2007 dan Kota Payakumbuh menerima program ini pada tahun kedua pelaksanaannya yaitu tahun 2008. Sementara Program SPSS adalah program APBD Provinsi Sumatera Barat, merupakan bagian dari Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) yang diusung oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat periode 2010-2015 dimana launching pertama program ini dilaksanakan di Kota Payakumbuh pada tahun 2010. Program ini berorientasi kepada percepatan pembangunan ekonomi berbasis rumah tangga di nagari, kelurahan dan desa, melalui sektor peternakan. Sebab beternak bisa memanfaatkan lahan marginal dalam skala kecil, dan limbahnya dapat kembali menyuburkan lahan secara berkelanjutan.

Namun program-program ini belum diketahui secara jelas keberhasilan pelaksanaannya dan implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Program Pembangunan Peternakan Sapi Potong dan Implikasinya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Payakumbuh”**.

#### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan Sapi Potong di Kota Payakumbuh.
2. Bagaimana Pendapatan Rumah Tangga Petani/Peternak Penerima Program Pembangunan Peternakan Sapi Potong di Kota Payakumbuh.
3. Bagaimana Implikasi Pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan Sapi Potong terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Payakumbuh.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan Sapi Potong di Kota Payakumbuh.
2. Untuk Menganalisis Pendapatan Rumah Tangga Petani/Peternak Penerima Program Pembangunan Peternakan Sapi Potong di Kota Payakumbuh.
3. Untuk Menganalisis Implikasi Pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan Sapi Potong terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Payakumbuh.

### **Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengambil kebijakan tentang pembangunan peternakan.
2. Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan khususnya Sapi Potong dalam pengentasan kemiskinan keluarga.